

# **RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2024**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
2024**

## KATA PENGANTAR

Atas berkah rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 berhasil kami susun. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 mengacu kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Semoga Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Banjarnegara, 10 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**Ir. SETYA ADI PRABAYUWANA**

Pembina Tk. I

NIP. 19660507 199903 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
 <b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika .....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika .....	29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	42
2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	42
 <b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika .....	44
3.3. Program dan Kegiatan .....	46

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika .....	58
4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik .....	59
4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian .....	59
<b>BAB V : PENUTUP</b>	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Renja Dinas Komunikasi dan Informatika) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Komunikasi dan Informatika, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan

Rancangan Akhir RKPD, pelaksanaan forum Dinas Komunikasi dan Informatika/lintas Dinas Komunikasi dan Informatika, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD, penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi terkait. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019

- tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).
29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 64)

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2024 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2024 dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024;

- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sistematika dokumen Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, dan review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

**BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, serta program dan kegiatan tahun 2024.

**BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan sasaran RKPD.

**BAB 5 : PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi urusan Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.465.818.000 dengan fokus utama pada Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta penyiaran melalui transformasi digital (*uraikan prioritas daerah tahun 2022 yang didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika*). Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Belum optimalnya website yang dikelola OPD
2. Belum optimalnya PPID di OPD
3. Pengembangan program SATU DATA belum optimal
4. Infrastruktur persandian belum optimal

Dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.615.818.000,-

Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi 5 program, 10 kegiatan, dan 25 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 5.465.818.000,- Pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022, program/kegiatan/subkegiatan yang bertambah meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Dinamika yang terjadi selama tahun 2022 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Dinas

Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2022, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
- b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada. Mesi demikian tetap ada beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya :
  1. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika, seperti tenaga programmer komputer;
  2. Kurangnya pembinaan pada pengelola WEB OPD;
  3. Kurang dukungan Anggaran yang memadai di tingkat OPD;
  4. Belum adanya aplikasi pelaporan data sektoral yang terintegrasi secara terpadu;
  5. Belum terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Sandi dan Telekomunikasi.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Program Aplikasi Informatika Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan informatika dengan pihak-pihak terkait baik di daerah, provinsi maupun pusat terkait regulasi yang ada.
2. Sosialiasi, monitoring, evaluasi dan pendampingan Dinas Komunikasi dan informatika terkait kegiatan penyebarluasan informasi yan dilaksanakan.
3. Kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kegiatan di bidang pengembangan e-government untuk meningkatkan kualias layanan publik.

Pada tahun perencanaan selanjutnya perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kerja sama dengan pihak terkait (Organisasi/lembaga TIK lain di luar Pemda);
3. Dukungan Anggaran guna pengembangan E-Government di masing-masing OPD;
4. Penguatan kembali PPID;
5. Mengupayakan kembali aktifnya media komunikasi masyarakat melalui KIM dan FK METRA;
6. Mengupayakan adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas bagi SDM pengelola sandi dan telekomunikasi, dan Pengelola Satu Data
7. Mengupayakan pemahaman kepada OPD selaku produsen dan untuk Peningkatan kualitas data statistic sectoral untuk perencanaan pembangunan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pencapaian Renstra  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
s.d. Tahun 2022\* Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s/d tahun 2023	
					Target Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022	Realisasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
2.	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak</b>									

	<b>Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
2.16	<b>Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika</b>									
2.16.01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.01.2.01	<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun		100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.01.2.01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen		

		Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 dokumen / laporan	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen		
2.16.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan administrasi		100%	100%	100%	100%	100%		

		keuangan daerah								
2.16.01.2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 orang  1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	40 orang		
2.16.01.2.02.03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	110 dokumen  1 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	100%	110 dokumen		
2.16.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah paket Peralatan		100%	1 paket	1 paket	100%	3 paket		

		dan Perlengkap an								
2.16. 01.2. 06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	100%	11 paket	11 paket	100%	12 paket		
2.16. 01.2. 06.06	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	276 eksemplar	<b>100%</b>	276 eksemplar	276 eksemplar	100%	276 eksemplar		
2.16. 01.2. 07	<b><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i></b>	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah								

2.16. 01.2. 07.01	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan						3 paket		
2.16. 01.2. 07.02	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						12 unit		
2.16. 01.2. 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jas Penunjang urusan daerah		100%	100%	100%	100%	100%		
2.16. 01.2. 08.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan 12 bulan	100%	12 bulan/laporan	12 bulan/laporan	100%	12 laporan		

2.16. 01.2. 08.04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan (9 orang)	100%	9 orang	9 orang	100%	13 laporan		
2.16. 01.2. 09	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>	Jumlah Laporan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah								
2.16. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%	4 unit		

		Perizinannya								
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	1 unit		
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan 30 unit	100%	12 bulan	12 bulan	100%	30 unit		
2.16.02	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Persentase diseminasi Informasi Publik		100%	100%	100%	100%	100%		
2.16.02.2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah informasi yang dikelola								

2.16. 02.2. 01.02	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 dokumen	100%	12 bulan	12 bulan	100%	5 dokumen		
2.16. 02.2. 01.04	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	6 dokumen	4 kegiatan	6 dokumen	6 dokumen	100%	5 dokumen		
2.16. 02.2. 01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen 1 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	12 dokumen		
2.16. 02.2. 01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen		

2.16. 02.2. 01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 layanan	4 kegiatan	6 layanan	6 layanan	100%	6 layanan		
2.16. 02.2. 01.01 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya						160 orang		
2.16. 02.2. 01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan	3 dokumen	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 dokumen		
2.16. 03	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>1. Persentase organisasi perangkat</b>		44 SIM	21 SIM	47 SIM	100%	49 SIM	49 SIM	100%

		<p><b>daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b></p> <p><b>2. Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b></p>								
2.16.03.2.01	<p><b><i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b></p>	<p>Jumlah Perangkat Daerah dan pelayanan public yang terhubung dengan akses internet</p>								

		yang disediakan oleh Dinas Kominfo								
2.16.03.2.01.03	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 sistem	<b>100 %</b>	2 sistem	2 sistem	100%	2 sistem		
2.16.03.2.02	<b><i>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>Persentase perangkat daerah yang terlayani pusat data pemerintah/data center</b>								

2.16. 03.2. 02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	226 dokumen / Menara	100%	226 menara	226 menara	100%	195 dokumen		
2.16. 03.2. 02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen ( SPBE)	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen (SPBE dan Smart City)		

2.16. 03.2. 02.07	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 lisensi	100%	4 lisensi	4 lisensi	100%	1 aplikasi		
2.16. 03.2. 02.10	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	100%	3 dokumen		
2.20	<b>Statistik</b>									

2.20.02	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Persentase ketersediaan data statistic sektoral</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.20.02.01	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang menggunakan data statistik daam menyusun perencanaan pembangunan</b>								
2.20.02.01.01	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	3 dokumen (BDA, KDA, Statistik Sektoral)	3 jenis 1 aplikasi	30 buku 1 aplikasi	30 buku 1 aplikasi	100%	4 dokumen (BDA, KDA, Statistik Sektoral, Metadata)		

		Diseminasi Data Statistik Sektoral					100%			
2.20.02.01.02	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun						44 dokumen		
2.20.02.01.03	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik						1 paket		
2.20.02.01.04	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi						44 orang		
2.21	<b>Persandian</b>									

2.21.02	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Aplikasi yang di Asesmen KAMI</b>		-						
2.21.02.2.01	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Aplikasi yang di Asesmen keamanan informasinya</b>								
2.21.02.2.01.03	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	44 OPD	100%	44 OPD	44 OPD	100%	1 laporan		

2.21. 02.2. 01.04	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengguna kan Layanan Keamanan Informasi						25 OPD		
-------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--------	--	--

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Dinas komunikasi dan Informatika mengampu 6 (enam) Indikator. Dari 6 indikator tersebut, semuanya atau 6 berstatus tercapai bahkan ada 2 indikator yang melampaui target yang sudah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Kesiapan aplikasi dan data dukungnya untuk bisa diintegrasikan mengakibatkan masih sedikitnya aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi.
2. Keterbatasan akun zoom meeting yang kapasitasnya maksimal hanya 100 peserta dan hanya memiliki satu akun, jadi ketika ada permintaan untuk melayani lebih dari 100 peserta tidak dapat difasilitasi.
3. Keterbatasan jumlah infrastruktur dan peralatan yang perlu adanya penambahan, baik fasilitas publik, kecamatan dan kelurahan yang belum terhubung.
4. Peralatan Infrastruktur radio yang rusak dan tidak memenuhi standar.
5. Banyaknya akun media sosial dan layanan aduan masyarakat yang harus dikelola, sedangkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat terbatas.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Mengupayakan penyesuaian data-data pendukung aplikasi agar siap untuk diintegrasikan.
2. Aplikasi zoom apabila lebih dari 100 peserta, peserta yang lain agar mengikuti secara streaming melalui media sosial, namun tidak dapat berinteraksi dengan peserta yang lain.
3. Memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki oleh pihak ketiga.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan yang rusak.
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang sudah ada.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Dinas komunikasi dan Informatika				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		IKK LPPD	28	28	30	32	6,82	8,51	33,33	35	37	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		IKK LPPD	20	40	60	80	63,25	81,67	89,86	85	87	
4	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

	perencanaan pembangunan daerah												
5	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah		IKK LPPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

\*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/2020

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 3 urusan, yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPD Tahun 2023-2026, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2024 mencakup ketiga urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi dan peningkatan pelayanan Dinkominfo kepada OPD
2. Belum optimal pelaksanaan dan pengembangan e-government dalam rangka menunjang pelayanan publik dan pencapaian Indeks SPBE sesuai standard nasional.
3. Belum optimalnya pelaksanaan persandian dan penyediaan data statistik untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

1. Terhambatnya pemenuhan kebutuhan data dan informasi untuk perencanaan program
2. Belum terlaksana audit SPBE sebagai salah satu indikator dalam penilaian indeks SPBE
3. Tingkat keamanan informasi belum terukur

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi

pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Perkembangan teknologi informasi yang mengharuskan pelayanan publik secara online mengakibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika selalu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang teknologi informasi.
2. Kemudahan masyarakat membuka akses informasi melalui medsos menuntut Dinas Komunikasi dan informatika untuk memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan masyarakat.
3. Kebutuhan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan memerlukan terbangunnya system/aplikasi data yang terintegrasi.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2024 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui implementasi SPBE
2. Membangun Satu Data Indonesia Daerah
3. Meningkatkan keamanan informasi dan aplikasi
4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik, pelayanan pengelolaan pengaduan dan informasi

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPD Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026, prioritas arah kebijakan, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 meliputi:

1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan TIK
2. Penguatan keterbukaan informasi publik
3. Penguatan ketersediaan data sektoral
4. Penguatan persandian dan keamanan informasi

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara**

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Catatan Penting
							Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	
2					<b>Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>						
2	16	01			<b>Bidang Usuran Komunikasi dan Informatika</b>						
2	16	01			<b>Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
2	16	01	01		<b>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
2	16	01	01	01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	12.500.000	Dinkominfo	APBD	
					<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	7 Dokumen	10.000.000	Dinkominfo	APBD	



2	16	01	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>292.353.600</b>			
2	16	01	06	05	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 meja kerja, 3 lemari arsip	46.497.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	06	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 AC, 4 laptop, 2 PC, 4 printer	245.856.600	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>297.600.000</b>			
2	16	01	06	02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72.600.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	08	04	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	225.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>155.000.000</b>			

2	16	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	100.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit AC, 12 laptop, 8 printer, 1 genset	30.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02			<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>			<b>1.223.668.000</b>			
2	16	02	01		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1.223.668.000</b>			

2	16	02	01	02	<i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 dokumen (pengelolaan website banjarnegarakab, layanan pengaduan)	80.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	04	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen (baliho sosialisasi masyarakatan, kalender, Derap Serayu)	325.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen (pengelolaan RSPD, penggantian perlatan radio yang rusak)	283.668.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	16	02	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 dokumen (PPID, KIM, FK METRA)	10.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 layanan	325.000.000	Dinkominfo	APBD	

2	16	02	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	160 orang	100.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	02	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			100.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	03			<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>			<b>2.480.790.300</b>			
2	16	03	01		<b><i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			<b>1.280.820.000</b>			
2	16	03	01	03	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 OPD	1.280.820.000	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	16	03	02		<b><i>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>			<b>1.199.970.300</b>			

2	16	03	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	195 dokumen	16.500.000	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	16	03	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 dokumen (arsitektur layanan dan infrastruktur SPBE, Implementasi SPBE)	413.490.000	Dinkominfo	APBD	
2	16	03	02	07	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	47 unit aplikasi	304.334.800	Kab. Banjarnegar	APBD	

2	16	03	02	10	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	3 dokumen (manage data centre, pemeliharaan jaringan, fasilitas vidcon)	465.645.500	Kab. Banjarnegar	APBD	
2	20				<b>Statistik</b>						
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>			<b>359.000.000</b>			
2	20	02	01		<b><i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44 dokumen	<b>359.000.000</b>	Dinkominfo	APBD	
2	20	02	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	82.000.000	Dinkominfo	APBD	

2	20	02	01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	44 Orang	111.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	20	02	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	44 Dokumen	15.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	20	02	01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Paket	151.000.000	Dinkominfo	APBD	
2	21				<b>Persandian</b>						
2	21	02			<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>			<b>297.357.500</b>			
2	21	02	01		<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>297.357.500</b>			

2	21	02	01	03	<i>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	127.357.500	Kab. Banjarnegara	APBD	
2	21	02	01	04	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	44 OPD	170.000.000	Kab. Banjarnegara	APBD	
								<b>10.322.722.671</b>			

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Masih perlunya pengembangan Satu Data Indonesia Banjarnegara agar diperoleh hasil data yang valid dan akurat, dapat dibagi pakaikan ke pemerintah pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan.
2. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah
3. Perlu upaya untuk mempertahankan/meningkatkan indeks SPBE (Tahun 2022 indeks SPBE mencapai 2,86 dengan katefori BAIK)

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL					

#### 2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2024 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
1.	NIHIL				

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas komunikasi dan Informatika**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika dalam rangka mewujudkan good governance.
2. Meningkatkan Pendayagunaan e-Goverment menuju Banjarnegara Smart City.
3. Meningkatkan pengelolaan informasi dan pelayanan komunikasi di lingkungan OPD Pemerintah Kab. Banjarnegara.

4. Meningkatkan penyediaan data statistik dan pelaksanaan persandian untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
  - a. Meningkatkan jumlah dan kualitas data yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan dapat dibagi pakaikan ke Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mendukung pembangunan daerah;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan system komunikasi dan Informatika berbasis teknologi informasi modern;
  - c. Terlaksananya keamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang baik dan proporsional.

Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan public dan akuntabilitas Dinas komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatnya deseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatnya Ketersediaan data statistik untuk menunjang kinerja pembangunan daeah.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan persandian :
  - a. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur dan masyarakat dibidang kominfo serta terjalin kerjasama informasi dengan media massa;

- b. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi untuk kesejahteraan masyarakat diberbagai bidang;
- c. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur Komunikasi dan Informatika.

### 3.3 Program dan Kegiatan

REKAPITULASI USULAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

OPD: Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Sumber Dana	Catatan Penting/Analisis Kebutuhan	Prakiraan Maju Tahun 2025
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan													
2					Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							9.373.000.000			9.874.109.724
2	16	01			Bidang Usuran Komunikasi dan Informatika										
2	16	01			Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							5.314.187.000			5.513.499.724
2	16	01	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22.500.000			22.000.000
2	16	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinkominfo		7 dokumen	12.500.000	APBD	7 dokumen perencanaan (Renja, RKT, RKA, DPA, RTP SPIP, KAK,PK)	12.000.000

2	16	01	01	06	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP		Dinkominfo		7 Dokumen	7 dokumen pelaporan kinerja (LKPJ,LPPD,LKJIP, Laporan Keuangan semester I, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Pengukuran Kinerja, POK)	10.000.000	APBD	7 dokumen pelaporan kinerja (LKPJ,LPPD,LKJIP, Laporan Keuangan semester I, Laporan Keuangan Akhir Tahun, Pengukuran Kinerja, POK)	10.000.000
2	16	01	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>4.192.871.885</b>			<b>4.607.659.074</b>
2	16	01	02	01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Dinkominfo		40 orang	Gaji dan Tunjangan ASN	4.097.871.885	APBD	Gaji dan Tunjangan ASN	4.507.659.074
2	16	01	02	03	<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dinkominfo		160 dokumen	dokumen SPP dan SPJ (honor pengelola keuangan)	95.000.000	APBD	160 dokumen SPP dan SPJ (honor pengelola keuangan)	100.000.000
2	16	01	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Dinkominfo				386.491.500			<b>427.840.650</b>

2	16	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan		Dinkominfo		3 paket	(peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan kantor)	10.000.000	APBD	3 paket (peralatan kebersihan dan bahan pembersih, perlengkapan kantor)	15.000.000
2	16	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Dinkominfo		12 paket		343.491.500	APBD		377.840.650
2	16	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dinkominfo		276 eks/dokumen	(surat kabar untuk guntingan pers, diasang di alun2)	33.000.000	APBD	276 eks/dokumen (surat kabar untuk guntingan pers, diasang di alun2)	35.000.000
2	16	01	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Dinkominfo				<b>259.723.615</b>			<b>285.500.000</b>
2	16	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Dinkominfo		Meja kursi ruang pertemuan dinkominfo		45.000.0000		Meja kursi rapat	49.500.000
2	16	01	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan		Dinkominfo		1 PC, 1 Printer, 1 mesin fax, 3 Laptop, 1 pc editing, 3 AC, kamera		214.723.615		Ada tambahan 10 CPNS sehingga sarpras masih kurang	236.000.000





2	16	02	01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Banjarnegara	12 dokumen (baliho sosialisasi kemasyarakatan, kalender, Derap Serayu)	220.000.000	APBD	242.000.000
2	16	02	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Banjarnegara	12 dokumen (pengelolaan RSPD, penggantian peralatan radio yang rusak),	357.000.000	APBD	360.000.000
2	16	02	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kab. Banjarnegara	3 dokumen (PPID, KIM, FK METRA)	10.000.000	APBD	25.000.000
2	16	02	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kab. Banjarnegara	6 layanan (Jumpapers, jasa iklan/reklame, film dan pemotretan di media massa TV dan Feature nasional, penyelenggaraan lomba	300.000.000	APBD	330.000.000



						Pemerintah Daerah				tagihan internet data center, OPD, keamatan dan kelurahan					
2	16	03	02		<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>1.122.635.500</b>		<b>1.204.000.000</b>	
2	16	03	02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Kab. Banjarnegara		Monev jaringan banjarnegara online di OPD, kecamatan, kelurahan, fasum		16.500.000	APBD	Monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi	15.000.000
2	16	03	02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Dinkominfo		2 dokumen (tersedia dokumentasi dokumen arsitektur SPBE, terlaksananya evaluasi SPBE, Terlaksananya Bimtek Smart City)		413.490.000	APBD	2 dokumen (arsitektur layanan dan infrastruktur SPBE, Implementasi SPBE)	450.000.000

2	16	03	02	07	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>			Dinkominfo		Tersedianya pendukung pemerintah (5 iisensi; firewall, IP address, pemeliharaan website, zoom lisence 100, VPS domain)		254.000.000	APBD	47 unit aplikasi	279.400.000	
2	16	03	02	10	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah</i>	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi		Kab. Banjarnegara		Pemeliharaan jaringan e-government, manage data center, pembelian peralatan jaringan serta penyusunan arsitektur data center		438.645.500	APBD	3 dokumen (manage data centre, pemeliharaan jaringan, fasilitas vidcon)	460.000.000	
2	20				<b>Statistik</b>											<b>183.920.000</b>
2	20	02			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>							<b>359.000.000</b>				<b>380.000.000</b>
2	16	02	01		<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>							<b>359.000.000</b>				<b>380.000.000</b>

2	16	02	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Banjarnegara	4 dokumen (mendukung Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang SATU DATA INDONESIA)	82.000.000	APBD	44 dokumen	85.000.000
2	16	02	01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Banjarnegara	44 Orang (dalam rangka pemahaman kepada Kepala OPD dan peningkatan kapasitas pengelola data OPD)	111.000.000			115.000.000
2	16	02	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kab. Banjarnegara	44 Dokumen (untuk menggali data-data yang dimiliki oleh OPD dimana dengan metadata ini bisa untuk mencari data yang	15.000.000			20.000.000



2	21	02	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informas	Kab. Banjarnegara	Persiapan Sertifikasi ISO 27001, jasa konsultan untuk TTE	150.000.000	44 OPD	150.000.000
					<b>JUMLAH</b>				<b>9.373.000.000</b>		<b>9.585.268.198</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/ kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut

#### **1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**

Rencana program, kegiatan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika di tahun 2024 pada Urusan Komunikasi dan Informatika terdiri dari 2 program, 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

##### **a. Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Program informasi dan komunikasi publik terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan 7 sub kegiatan yaitu Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Media; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

##### **b. Program Aplikasi Informatika**

Program aplikasi informatika terdiri dari 2 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan 5 sub kegiatan yaitu Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah; Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

## **2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program penyelenggaraan statistik sektoral terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Dengan 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral; Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektoral; Pengembangan Infrastruktur

## **3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

### **a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi terdiri dari 1 kegiatan yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Dengan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan

Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; Penyediaan Layanan  
Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika selanjutnya menjadi platform operasional bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2023-2026. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi acuan bagi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal : 10 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



**Ir. SETYA ADI PRABAYUWANA**

Pembina Tk. I

NIP. 19660507 119903 1 005